

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam suatu perusahaan dibutuhkan keberadaan manajer yang dapat mengambil keputusan yang berdampak penting dalam pengelolaan perusahaan. Keputusan yang diambil bukan sekedar kebijakan perusahaan saja akan tetapi juga kebijakan yang berkaitan dengan keuangan dan finansial perusahaan. Sebelum menentukan kebijakan keuangan manajer juga harus meneliti sifat, biaya dan sumber dana yang akan digunakan karena setiap pendanaan memiliki dampak finansial yang berbeda. Keputusan yang akan di ambil oleh manajer juga harus melindungi kepentingan pemegang saham dan juga harus dapat diterima oleh semua pihak.

Keputusan pendanaan dapat dilakukan dengan berbagai cara yang bisa di dapat dari pendanaan internal atau eksternal seperti menerbitkan saham atau melakukan utang. Keputusan pendanaan dilakukan agar perusahaan mendapatkan dana atau investasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan.

Untuk memenuhi biaya operasional perusahaan atau untuk melakukan ekspansi perusahaan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu perusahaan cenderung untuk melakukan pendanaan eksternal seperti yang

dilakukan oleh PT Provident Agro Tbk yang berhasil meraih pinjaman sebesar Rp 719,5 miliar dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) seperti yang dilansir dari harian berita satu berikut:

**Jakarta** – PT Provident Agro Tbk (PALM) berhasil meraih pinjaman sebesar Rp 719,5 miliar dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI). Perseroan mendapatkan pinjaman tersebut melalui dua anak usahanya, yaitu PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL) dan PT Inti Global Laksana (IGL) pada 22 Juni 2015. Manajemen Provident Agro menjelaskan bahwa kredit tersebut bakal digunakan untuk ekspansi perseroan di Gorontalo.<sup>1</sup>

Berdasarkan fakta diatas memperkuat dari tujuan pendanaan eksternal perusahaan dimana utang dimanfaatkan sebagai modal perusahaan untuk melakukan ekspansi. Selain itu pendanaan dengan utang juga dapat dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan seperti yang dilakukan oleh PT PP (persero) yang mendapatkan kontrak baru sebesar Rp. 4,98 triliun hingga April 2016 atau sekitar 16,08 persen dari target total kontrak baru tahun ini sebesar RP 31 triliun yang dikutip dari harian okezone berikut:

Saat ini, lanjut dia, perseroan sedang mengkaji rencana penggalangan dana melalui dua instrumen, yaitu pinjaman perbankan dan penerbitan surat utang atau obligasi. "Kita akan kombinasikan pinjaman bank dan obligasi dengan memperhatikan suku bunga yang rendah,"ungkapnya. Pilihan penerbitan obligasi mempertimbangkan, suku bunga pinjaman perbankan saat ini berkisar 9-9,5 persen, sedangkan untuk obligasi sekitar 8,3 persen. Disebutkan, ruang perseroan untuk mendapatkan dana eksternal masih cukup besar mengingat

---

<sup>1</sup> <http://www.beritasatu.com/emiten/295057-provident-agro-raih-pinjaman-rp-7195-miliar.html> (diakses pada senin, 18 April 2016 pukul 22.12 WIB)

rasio terhadap utang atau "debt to equity ratio" (DER) perseroan tercatat sebesar 2,7 kali.<sup>2</sup>

Kebijakan utang harus ditetapkan dengan benar oleh manajer karena akan berdampak buruk untuk suatu perusahaan apabila tidak mempertimbangkan dan mengambil keputusan dengan benar. Manajer juga harus melihat bagaimana keadaan perusahaan untuk mengembalikan kewajiban yang telah dipinjamnya karena suatu perusahaan dapat mengalami kebangkrutan sebagai akibatnya. Sudah banyak perusahaan yang mengalami pailit karena tidak bisa membayarkan utangnya kembali seperti yang di alami oleh PT Wirajaya Packindo yang dilansir dari harian kontan berikut ini

JAKARTA. PT Wirajaya Packindo resmi berstatus pailit. Status ini menyusul ditolaknya permohonan perpanjangan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Wirajaya oleh para kreditur. Perusahaan kemasan ini tercatat memiliki total tagihan sebesar Rp 1,27 triliun. Tagihan ini berasal enam kreditur separatis sebesar Rp 1,1 triliun dan 22 kreditur konkuren sebesar Rp 173,34 miliar.<sup>3</sup>

Kebijakan utang dapat ditetapkan oleh manajer keuangan berdasarkan faktor-faktor pertimbangan yang mempengaruhi seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan dividen dan profitabilitas dalam suatu perusahaan.

Kepemilikan manajerial adalah dimana manajer memiliki saham perusahaan dengan persentase tertentu. Kepemilikan manajerial dapat mempengaruhi

---

<sup>2</sup> <http://economy.okezone.com/read/2016/05/02/470/1378425/ptpp-raih-kontrak-baru-rp4-98-t-hingga-april> (diakses pada Kamis, 5 Mei 2016 pukul 21.07 WIB)

<sup>3</sup> <http://nasional.kontan.co.id/news/kreditur-tak-sepakat-wirajaya-pailit> (diakses pada Selasa, 7 Juni 2016 pukul 15.21 WIB)

kebijakan utang karena manajer akan lebih berhati-hati dan tidak bersikap oportunis dalam mengambil keputusan mengingat manajer memiliki saham yang apabila kebijakan utang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan akan ikut merugikan saham yang dimilikinya. Perusahaan dengan kepemilikan manjerial dan institusional yang tinggi memiliki utang yang lebih kecil seperti perusahaan **Aldeyra Therapeutics Inc. (ALDX)** yang memiliki kepemilikan insider sebesar 0.74% dan kepemilikan institusional sebesar 83.52% memiliki utang sebesar \$1.29 juta dimana keadaan utang perusahaan ini berada pada taraf yang baik sebanding dengan perusahaan disektornya.<sup>4</sup>

Suatu perusahaan yang menyebarkan sahamnya kepada para investor memiliki kebijakan untuk membagikan laba yang didapatkan melalui pembagian dividen yang biasanya dilakukan setahun sekali. Kebijakan dividen yang ditetapkan setiap perusahaan pada umumnya berbeda dilihat dari persentase laba yang akan dibagikan. Semakin besar persentase laba yang akan dibagikan maka akan semakin kecil laba ditahan untuk kebutuhan perusahaan pada tahun yang akan datang sehingga memungkinkan perusahaan tersebut akan berutang untuk memenuhi biaya operasionalnya seperti yang dilakukan oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) yang dikutip dari harian berita satu berikut ini

**Jakarta** - PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) memutuskan untuk membagi dividen tunai senilai Rp 332,5 miliar atau setara dengan Rp 332,5 per lembar saham berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Rabu (18/5). Dividen yang merupakan 50% laba bersih

---

<sup>4</sup> <http://www.gurufocus.com/news/417176/largest-insiders-trades-of-the-week> (diakses pada senin, 13 juni 2016 pukul 02.45 WIB)

perusahaan untuk tahun buku 2015 tersebut rencananya akan dibayarkan pada 17 Juni 2016 mendatang. Dalam RUPS tersebut, perseoran juga melaporkan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance. "Setelah biaya penerbitan, dana hasil dari penerbitan obligasi ini digunakan untuk mendanai pembiataan baru," ujar Willy.<sup>5</sup>

Profitabilitas dalam suatu perusahaan juga berpengaruh terhadap kebijakan utang. Apabila laba perusahaan menurun maka perusahaan tersebut akan cenderung menaikkan utangnya untuk memenuhi pembiayaan operasional perusahaan seperti yang di alami oleh PT Angkasa Pura II yang dikutip dari harian *Okezone Finance* berikut ini

PT Angkasa Pura II mencatat penurunan tajam dalam laba bersih di semester I-2016. Laba bersih AP II tercatat mengalami penurunan laba bersih Rp574 miliar atau sekira 34,02 persen. Selain itu, AP II juga mencatat kenaikan utang yang cukup signifikan dari Rp4,03 triliun menjadi Rp7,24 triliun. Utang tersebut, berasal dari utang jangka pendek sebesar Rp2 triliun dan utang jangka panjang sebesar Rp5,24 triliun.<sup>6</sup>

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai pengaruh antara kepemilikan manajerial dan kebijakan dividen terhadap kebijakan utang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andhika (2012) kebijakan dividen dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang secara stimulan dan kebijakan dividen dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang.

---

<sup>5</sup> <http://www.beritasatu.com/bank-dan-pembiayaan/365659-adira-finance-bagikan-dividen-rp-3325-miliar.html> (diakses pada Selasa, 7 Juni 2016 pukul 15.39 WIB)

<sup>6</sup> <http://economy.okezone.com/read/2016/08/15/278/1464260/laba-bersih-angkasa-pura-ii-turun-tajam-34> (diakses pada Rabu, 14 September 2016 pukul 18.46 WIB)

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Marhamah (2016) kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang sedangkan kebijakan dividen berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan hutang. Apit Susanti dan Sekar Mayangsari (2014) juga melakukan penelitian dengan melibatkan variabel kepemilikan manajerial, kebijakan dividen dan kebijakan utang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap kebijakan utang.

Berdasarkan latar belakang tersebut serta ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai “Pengaruh kepemilikan manajerial dan kebijakan dividen Terhadap Kebijakan utang”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan beberapa masalah yang berkaitan dengan kebijakan utang , yaitu:

1. *Financial distress* perusahaan
2. Kepemilikan saham manajerial yang berkurang
3. Kepemilikan intitusional perusahaan yang berkurang
4. Pembagian dividen yang semakin besar
5. Profitabilitas perusahaan yang menurun

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas dapat diketahui bahwa kebijakan utang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Karena luasnya penjabaran dari masing-masing faktor, maka peneliti membatasi masalah yang

akan diteliti hanya pada masalah kepemilikan manajerial dan kebijakan dividen terhadap kebijakan utang. Variabel kepemilikan manajerial dipilih peneliti dikarenakan kepemilikan manajerial merupakan faktor yang menyebabkan manajer lebih berhati-hati dalam memilih kebijakan utang. Variabel kebijakan dividen dikarenakan kebijakan dividen mempengaruhi laba ditahan sehingga memungkinkan perusahaan untuk berhutang. Kebijakan utang diukur dengan proksi debt to equity ratio (DER) . Sedangkan kepemilikan manajerial diukur dengan proksi manajerial ownership (MOWN) . Dan kebijakan dividen diukur dengan proksi dividen payout ratio (DPR).

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan:

1. Adakah pengaruh antara kepemilikan manajerial dengan kebijakan utang perusahaan?
2. Adakah pengaruh antara kebijakan dividen dengan kebijakan utang perusahaan?
3. Adakah pengaruh kepemilikan manajerial dan kebijakan dividen dengan kebijakan utang perusahaan?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini baik secara teoretis maupun praktis memiliki kegunaan sebagai berikut:

## 1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan baru dan menambah referensi informasi dibidang akuntansi yang terkait dengan kepemilikan manajerial, kebijakan dividen dan kebijakan utang.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi profesi Akuntan

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan utang.

### b. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan memberikan gambaran mengenai permasalahan kepemilikan manajerial, kebijakan dividen dan kebijakan utang sehingga menjadi bekal tersendiri bagi peneliti sebelum terjun ke dunia pekerjaan.

### c. Bagi pihak Universitas

Hasil penelitian ini sebagai sumbangan koleksi berupa bahan pustaka dan bacaan bagi mahasiswa pendidikan akuntansi khususnya dan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta pada umumnya.



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIK**

#### **A. Deskripsi Konseptual**

##### **1. Kebijakan Utang**

###### **a. Pengertian Kebijakan Utang**

Dalam aktivitas bisnis yang begitu pesat saat ini telah memposisikan suatu perusahaan berada dalam keadaan yang penuh dengan persaingan. Bukan hanya bersaing dalam lingkungan domestik namun juga internasional. Kondisi dan situasi ini memaksa perusahaan harus memiliki dan mempertahankan target serta rencana yang sudah dibuat, termasuk menaikkan angka penjualan. Atas dasar pandangan yang sederhana ini kebijakan utang menjadi bagian yang tidak bisa dielakan.

Utang merupakan kewajiban yang dimiliki perusahaan yang bersumber dari dana eksternal baik yang berasal dari sumber pinjaman perbankan, leasing, penjualan obligasi dan sejenisnya. Sedangkan dari sudut pandang manajemen perusahaan utang dilihat sebagai sumber dana alternatif yang mampu memberikan solusi bersifat konstruktif, baik secara jangka pendek dan jangka panjang.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Irham Fahmi, Pengantar Manajemen Keuangan, Alfabeta, Bandung, 2014. P 160-161